

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan kunci dalam menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk itu perlu adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia. Perkembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan penguasaan dan peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, salah satu sumber daya manusia dalam dunia pendidikan adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dituntut untuk memiliki kualitas dan kuantitas sehingga mampu membangun dan mengembangkan sekolah yang bersaing secara global.

Aplikasi Platform merdeka mengajar (PMM) dirancang untuk memfasilitasi pengajaran, evaluasi siswa dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi pendidik, ini berfungsi juga untuk menginspirasi rekan kerja (Vhalery et al., 2022). Dengan adanya platform ini, Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Pendidik dan Siswa/i dapat meningkatkan kinerjanya dengan kreativitas yang dikembangkan sendiri (Pratiwi et al., 2023). Begitu juga dengan sitem dan manajemen kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan efektif akan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru yang dipimpinnya dalam bekerja. Dunia pendidikan tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum. Dr. H. Nana Sudjana (2005: 67) mengatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituang ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah,

kurikulum sebagai niat & rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar, dan yang terlibat di dalam proses tersebut, yaitu pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, B. Bara, Ch (2008) mengkonsepkan kurikulum ke dalam 4 pengertian yakni: (1) kurikulum sebagai suatu produk; (2) sebagai program; (3) sebagai hasil yang diinginkan atau dicapai; dan (4) sebagai pengalaman belajar.

Kurikulum juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, yaitu “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Di Indonesia juga ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013 hingga yang terbaru ini, yaitu kurikulum merdeka ([ditjen.kemdikbud.go.id](http://ditjen.kemdikbud.go.id)). Perubahan kurikulum menjadi hal yang lumrah untuk suatu tujuan pengembangan peningkatan kompetensi lulusan. Seiring perubahan zaman dan kondisi sosial yang menyebabkan perubahan kurikulum salah satunya adalah karena terjadi wabah covid-19 (Mafudah & Asrori, 2016).

Kondisi pandemi covid-19 melanda negeri ini sejak awal tahun 2020. Sejak itu diterapkan proses pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan banyak kendala terkait proses pembelajaran pada satuan pendidikan, khususnya Sekolah Dasar. Kurikulum 2013 yang digunakan pada era prapandemi menjadi satu-satunya kurikulum yang digunakan satuan pendidikan untuk pembelajaran. Pada masa pandemi 2020 sampai dengan 2021, Kementerian Pendidikan dan Teknologi akan

menerbitkan pedoman penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat (K-13 yang disederhanakan) sebagai acuan kurikulum satuan pendidikan. Dalam pemulihan pembelajaran ini, kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan secara bertahap (Vhalery et al., 2022). Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran, begitu juga Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka (Sugih et al., 2023). Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Barlian et al., 2022).

Sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek, dukungan terhadap implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan melalui proses transformasi pembelajaran, dengan fokus salah satunya transformasi digital. Maka, Platform Merdeka Mengajar yang dikenal dengan PMM ini menjadi aplikasi yang diharapkan mampu mendukung pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia menjadi lebih baik (Siregar, 2020). Sejak tahun 2023, Kurikulum merdeka telah mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, penerapannya masih muncul berbagai macam kendala. Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana yang mampu mendukung dan memfasilitasi para guru dalam persiapan penerapan kurikulum merdeka (Vhalery et al., 2022). Optimalisasi sumber daya dianggap sebagai alternatif

yang paling tepat untuk menciptakan sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi (Taher et al., 2023).

Optimalisasi sumber daya merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk menciptakan sekolah yang berkualitas dan efisien. Optimalisasi sumber daya dapat membantu menghemat biaya operasional sekolah, sehingga dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. Optimalisasi sumber daya dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Optimalisasi sumber daya dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan sumber daya yang lebih baik dan lebih efektif. Optimalisasi sumber daya dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Optimalisasi sumber daya dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dengan menyediakan informasi yang lebih akurat dan lebih transparan.

Pemanfaatan PMM di sekolah memerlukan manajemen kepala sekolah yang efektif, mengingat peran sentral kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengelola keseluruhan proses pendidikan (Suminiati, 2019). Pemanfaatan Program Pembangunan Manusia (PMM) di sekolah memerlukan manajemen yang efektif dari kepala sekolah (Kurniawati et al., 2020). Kepala sekolah sebagai pemimpin dibidang pendidikan, harus memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan keterampilan untuk mengintegrasikannya secara optimal dalam strategi pendidikan (Pendidikan et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepala sekolah

memiliki dampak signifikan pada kinerja guru (Maulida, 2022). Kepala sekolah harus memiliki rencana strategis untuk mengintegrasikan PMM ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Kepala sekolah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi PMM, termasuk anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Kepala sekolah harus memastikan bahwa guru-guru memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikan PMM, termasuk pelatihan dan pendampingan. Kepala sekolah harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa PMM diimplementasikan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah harus berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga lain, untuk mendukung implementasi PMM. Dengan keahlian manajemen pendidikan yang profesional, diharapkan kepala sekolah mampu merancang program sekolah yang efektif, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, membangun kinerja staf sekolah, dan memberikan bimbingan kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (Fanani, 2018).

Meskipun PMM menawarkan peluang besar, mengelola platform ini juga menghadirkan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh kepala sekolah, khususnya pada sekolah dasar. Perubahan paradigma dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring menuntut adaptasi dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, dan kepala sekolah. Selain itu, sebaran jaringan internet yang tidak merata pada daerah – daerah tertentu juga menjadi masalah yang serius. Realitas yang terjadi saat ini bahwa platform merdeka mengajar belum maksimal dimanfaatkan di 38 provinsi yang ada di Indonesia, dalam hal ini salah satunya provinsi Aceh. Berdasarkan amatan prapenelitian peneliti, sebelum adanya Platform Merdeka

Mengajar, proses belajar mengajar konvensional berjalan sangat monoton, dimana guru menjadi *center of attention* dan siswa menjadi pendengar dan pemerhati guru saat mengajar. Hadirnya Platform Merdeka Mengajar mengubah pola proses belajar mengajar yang konvensional menjadi hubungan ketergantungan antara guru dan siswa lebih seimbang, dimana partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar lebih dominan dengan adanya diskusi dan proses pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas (Syahlan, 2015).

Secara umum, seluruh sekolah di provinsi Aceh sudah menerapkan proses belajar mengajar dengan kurikulum merdeka yang memanfaatkan platform merdeka mengajar sesuai dengan kebijakan dari kementerian pendidikan, salah satunya sekolah – sekolah di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya sekolah dasar di Kuta Buloh. Pemanfaatan platform merdeka mengajar seharusnya memberikan dampak positif, karena mempermudah proses belajar mengajar, namun faktanya di Kuta Buloh I belum terlihat efektifitas pemanfaatan yang dilakukan dan berdampak terhadap kinerja kepala sekolah. Menurut pengamatan prapenelitian peneliti, hal ini didasarkan pada ketidaksiapan kepala sekolah melakukan transformasi pembelajaran dari konvensional menuju pembelajaran yang berbasis digital.

Berdasarkan uraian di atas, prapengamatan peneliti, di Kuta Buloh terdapat dua sekolah dasar yaitu SD Negeri Kuta Buloh dan SD Muhammadiyah Kuta Buloh. Didapat dari informasi awal bahwa kepala sekolah dasar di Kuta Buloh sudah memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan mengembangkan sistem manajemen kepemimpinan yang baik sebagaimana fungsi seharusnya, namun belum cukup sempurna dalam pelaksanaannya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : Platform merdeka mengajar dalam meningkatkan kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kuta Buloh”.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, untuk lebih memusatkan perhatian dalam melaksanakan penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan terarah, sehingga hasilnya lebih optimal. Kajian penelitian ini membatasi permasalahan pada: Pemanfaatan platform merdeka mengajar dan kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kuta Buloh”.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan perlu untuk penulis kaji, yaitu:

“Bagaimana pemanfaatan platform merdeka mengajar dalam meningkatkan kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kuta Buloh”.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Pemanfaatan platform merdeka mengajar terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah di SD Muhammadiyah Kuta Buloh dan SDN 3 Kuta Buloh.
2. Untuk mengetahui manfaat Platform PMM dalam manajemen kepemimpinan dan kinerja Kepala Sekolah Dasar di Kuta Buloh.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut.

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai pengembangan konsep, asas ataupun teori-teori manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan pemanfaatan platform merdeka mengajar dan manajemen kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja kepala sekolah di SD Muhammadiyah .

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak, pada umumnya bagi masyarakat dan sekolah/organisasi lainnya, serta pada khususnya bagi kepala sekolah di satuan pendidikan dasar pada Kabupaten Aceh Selatan, dalam

hal pemanfaatan platform merdeka mengajar dan manajemen kepemimpinan terhadap kinerja kepala sekolah.